



---

|              |                |                 |                 |
|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Submitted:   | Revised:       | Accepted:       | Published:      |
| 10 Juli 2022 | 3 Agustus 2022 | 10 Agustus 2022 | 17 Agustus 2022 |

---

## Eksistensi Agama Dalam Politik PKB di Kabupaten Nganjuk

<sup>1</sup>Mohammad Arif, <sup>2</sup>Yuli Darwati

<sup>12</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

E-mail Correspondent: mohammadarif99@iainkediri.ac.id

### Abstract:

The collapse of the Soviet Union in the early 1990s marked the collapse of the communist bloc and the end of the Cold War era. From the context of major discourses on ideology, communism is no longer considered relevant. Francis called the phenomenon "the end of history", namely the phenomenon of narrowing the ideology of capitalism and liberalism. Then the discourse of globalization bubbled up, as if it were a continuation or a mere consequence of the glories of capitalism and liberalism. However, in the 21st century, with a different intensity from the 20th century, the religious factor has begun to be reckoned with in the global political treasures (The Economist (edition 3-9 November 2007) for example, tries to underline the "conclusion". Religion can no longer be underestimated. The rise of Islamic parties in Turkey's secular republic to Hindu nationalist powers in India's upcoming elections. There is also a tendency that China may be the largest Christian country in the world, but it may also have the largest Muslim population. It may be that these days we are in the process of revival of religions on the global political stage. As predicted by Samuel P Huntington, Islam will emerge as the dominant factor in "offsetting" the Western ideological discourse, after the death of communism. Indonesia is part of the global phenomenon of the world. Also experiencing a new phenomenon, where Islam became one of the drivers of the birth of the party, as a sign of the increasingly solid pillars of democracy, the party is one of the characteristics of the pillars of democracy. The phenomenon of the reform era has further strengthened the social affiliation of parties to religions in Indonesia, especially Islam which has a majority adherents. One of the parties

affiliated to Islam, especially to the largest religious mass organization in Indonesia, namely Nahdlatul Ulama (NU). The party called itself the National Awakening Party. The research that I did was to answer the religious position that sparked the motivation of the Islamic community to establish the National Awakening Party (PKB). Specifically, this research will answer; (1) What is the role and function of religion in global politics; (2) How is the implementation of Islamic religious values as the main basis in global politics for PKB in Nganjuk Regency; (3) Why the existence of Islamic values as the main basis and foundation in the National Awakening Party (PKB) in Nganjuk Regency. Meanwhile, the method we use is descriptive qualitative research, with a case study approach. By trying to dig up data naturally in the National Awakening Party (PKB) Nganjuk Regency. By conducting in-depth interviews with the chairman of PKB, and the Secretary of PKB. Supported by data from the documentation of party activities. The data that we have dug up can give results, that the existence of Islamic values is the basis and the main basis for the National Awakening Party (PKB) in Nganjuk Regency. The role and function of religion in today's global politics, is collaborative and even mutualistic symbiosis.

Keywords: PKB; Politics; The Existence of Religion

**Abstrak:**

Runtuhnya Uni Soviet pada awal 1990-an menandai hancurnya blok komunis dan berakhirnya era perang dingin. Dari konteks wacana-wacana besar tentang ideologi, komunis sudah dianggap tidak lagi relevan. Francis menyebut fenomena "the end of history", yaitu fenomena pengerucutan pada ideologi kapitalisme dan liberalisme. Kemudian menggelembungkan wacana globalisasi, seolah sebagai kelanjutan atau konsekuensi semata dari kegemilangan kapitalisme dan liberalisme. Namun, di abad ke-21 ini, dengan intensitas yang berbeda dengan abad ke-20, faktor agama mulai marak diperhitungkan kembali dalam khazanah politik global (The Economist (edisi 3-9 November 2007) misalnya, mencoba menggarisbawahi "kesimpulan" tersebut. Faktor agama tidak dapat dipandang lagi sebelah mata. Kebangkitan partai Islam di republik sekuler Turki hingga kekuatan nasionalis Hindu dalam pemilu India yang akan datang. Terdapat pula kecenderungan bahwa China mungkin saja menjadi negara Kristen terbesar sedunia, tetapi mungkin pula berpenduduk Islam terbesar pula. Boleh jadi, hari-hari ini kita tengah berada dalam proses kebangkitan agama-agama di pentas politik global. Sebagaimana sudah diramalkan Samuel P Huntington, Islam akan tampil sebagai faktor dominan di dalam "mengimbangi" wacana ideologi Barat, sepeninggal komunisme. Indonesia adalah bagian dari fenomena dunia secara global. Juga mengalami fenomena baru, di mana Agama Islam menjadi salah satu penggerak lahirnya partai, sebagai tanda semakin kokohnya pilar demokrasi, partai merupakan salah ciri pilar demokrasi tersebut.

Fenomena era reformasi, semakin memperkuat afiliasi sosial kepartaian kepada agama yang ada di Indonesia, terutama agama Islam yang memiliki penganut secara mayoritas. Salah satu partai yang berafiliasi ke Islam terutama ke ormas keagamaan terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Penelitian ini dilakukan, untuk menjawab terkait posisi agama yang menjadi penyulut motivasi masyarakat Islam untuk mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Secara khusus penelitian ini akan menjawab ; (1) Bagaimana peran dan fungsi agama dalam politik global ; (2) Bagaimana implementasi nilai agama Islam sebagai dasar utama dalam perpolitikan global bagi PKB di Kabupaten Nganjuk ; (3) Mengapa eksistensi nilai-nilai Islam sebagai dasar dan landasan utama dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Nganjuk. Sedangkan metode yang kami gunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Implementasi nilai agama Islam sebagai dasar utama dalam perpolitikan global bagi PKB di Kabupaten Nganjuk adalah realistik historis. Kelahirannya dibidani oleh NU. Eksistensi nilai-nilai Islam sebagai dasar dan landasan utama PKB di Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan PBNU, berpedoman pada aqidah ASWAJA, selalu aspiratif terhadap prinsip Bhineka Tunggal Ika dan NKRI Harga Mati. Islam sebagai dasar dan menjadi landasan utama dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Nganjuk. Peran dan fungsi agama dalam politik global saat ini, adalah kolaboratif dan bahkan simbiosis mutualistik.

Kata kunci: Eksistensi Agama; Politik; PKB.

## **PENDAHULUAN**

Runtuhnya Uni Soviet pada awal 1990-an menandai hancurnya blok komunis dan berakhirnya era perang dingin. Dari konteks wacana-wacana besar tentang ideologi, komunis sudah dianggap tidak lagi relevan. Francis menyebut fenomena "the end of history", yaitu fenomena pengerucutan pada ideologi kapitalisme dan liberalisme. Kemudian menggelembungkan wacana globalisasi, seolah sebagai kelanjutan atau konsekuensi semata dari kegemilangan kapitalisme dan liberalisme.

Namun, di abad ke-21 ini, dengan intensitas yang berbeda dengan abad ke-20, faktor agama mulai marak diperhitungkan kembali dalam khazanah politik global. Laporan khusus majalah *The Economist* (edisi 3-9 November 2007) misalnya, mencoba menggaris bawahi "kesimpulan" tersebut. Faktor agama tidak dapat dipandang lagi sebelah mata. *The Economist* mencatat beberapa gejala yang mencuat untuk memperkuat argumentasinya: kebangkitan partai Islam di republik sekuler Turki hingga

kekuatan nasionalis Hindu dalam pemilu India yang akan datang.<sup>1</sup> Terdapat pula kecenderungan bahwa China mungkin saja menjadi negara Kristen terbesar sedunia, tetapi mungkin pula berpenduduk Islam terbesar pula. Boleh jadi, hari-hari ini kita tengah berada dalam proses kebangkitan agama-agama di pentas politik global. Sebagaimana sudah diramalkan Samuel P Huntington, Islam akan tampil sebagai faktor dominan di dalam "mengimbangi" wacana ideologi Barat, sepeninggal komunisme.

Islam yang dimaksud ialah "Islam radikal" atau "fundamentalis" yang mengangkat senjata melawan "musuh-musuhnya". Mereka dianggap memusuhi Barat. Julukan mereka tambah lengkap setelah peristiwa 9/11-2001, sebuah serangan ke New York dan Washington yang menghebohkan itu: "Islam teroris". Perang melawan teroris yang dicanangkan Amerika Serikat (AS) dan diamini oleh para sekutunya, karenanya menjadi identik dengan perang melawan kelompok Islam radikal dan fundamentalis ini.<sup>2</sup> Era globalisasi adalah sebuah era atau dekade di mana terjadi pertemuan dan gerakan nilai-nilai budaya dan agama di seluruh dunia yang memanfaatkan jasa komunikasi, transformasi dan informasi hasil modernisasi teknologi tersebut.<sup>3</sup> Penjajahan teknologi bisa kita rasakan sebagai fenomena baru dalam era globalisasi saat ini. Dengan mengibarkan bendera ekonomi pasar bebas sebagai sarana arogansi negara maju terhadap negara-negara berkembang. Membentuk sistem perekonomian dan marketing produk-produknya, negara produsen memaksakan arogansinya ke negara konsumen, yang mayoritas merupakan negara-negara berkembang dan memiliki daya saing yang rendah. Politik global saat ini semakin menjauh dari prinsip dan nilai agama, apalagi ketika elektabilitas saat tidak mendasarkan pada kualitas politisinya, tetapi sudah masuk pada domain pembudayaan KKN dan materialisme. Visi, misi, serta personaliti politisinya tidak menjadi perhatian dan sesuatu yang urgen bagi masyarakat. Yang paling menyedihkan, bahwa fenomena yang muncul adalah seberapa besar calon kepala daerah, calon legislatif, bahkan calon presiden memberi sesuatu yang pragmatis bagi masyarakat calon pemilih.

Fenomena global yang muncul di masyarakat dunia, memberi dampak terhadap negara Indonesia juga. Terutama terkait dengan kondisi dinamika pperpolitikan di tiap-tiap negara, tak terkecuali Indonesia. Isu agama menjadi kemasam penting dalam dinamika politik dunia. Sebagai dampak semangat beragama dalam lingkungan NKRI. Demikian juga dalam responsecara politik, di Nganjuk berdiri semuapartai yang berafiliasi ke

---

<sup>1</sup> Agama dan Politik Global dalam <http://suar.okezone.com/read/2007/11/07/58/59069/agama-dan-politik-global>, diakses 10-9- 2021.

<sup>2</sup> Agama Dan Politik Global dalam <http://suar.okezone.com/read/2007/11/07/58/59069/agama-dan-politik-global>, diakses 10-9- 2021.

<sup>3</sup> Azizy, Qodri. 2004. *Melawan Globalisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hal. 20.

ormas NU, yang memiliki dinamika yang sangat menarik. Sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang EKSISTENSI AGAMA DALAM POLITIK PKB DI KABUPATEN NGANJUK, sebagai lokus dan subyek yang menjadi konsen penelitian ini.

Penelitian ini untuk menjawab beberapa fenomena yang fundamental, terkait berdirinya PKB serta upaya yang dilakukan untuk kemajuan demokrasi, khususnya di Nganjuk, yang meliputi; (1) Bagaimana peran dan fungsi agama dalam politik global; (2) Bagaimana implementasi nilai agama Islam sebagai dasar utama dalam perpolitikan global bagi PKB di Kabupaten Nganjuk; (3) Mengapa eksistensi nilai-nilai Islam sebagai dasar dan landasan utama dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Nganjuk

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Merupakan riset yang mengumpulkan data secara deskriptif tidak berbentuk angka-angka sebagai metode utamanya. Data-data yang digali atau yang dikumpulkan merupakan data dalam kata teks, kata-kata, simbol, gambar, meskipun juga dapat dikumpulkan data-data kuantitatif.<sup>4</sup> Dengan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus atau penelitian kasus adalah penelitian tentang subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subyek penelitian bisa dari individu, kelompok, lembaga ataupun masyarakat. Dengan melakukan penggalan secara wawancara mendalam (*indept interview*) kepada ketua DPC PKB Kabupaten Nganjuk. Juga kepada sekretaris DPC nya, yang didukung dengan data-data dari dokumen kegiatan PKB. Tujuan dari studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara detail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang khas dari kasus atau subyek yang kemudian dari sifat khas dijadikan sebagai hal yang bersifat umum. Dalam penelitian ini peneliti ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi dari unit-unit sosial yang menjadi subyek.

---

<sup>4</sup> Kaelan. 2012. Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner. Yogyakarta: Paradigma, 20.

## PEMBAHASAN

Menjelang berakhirnya pemerintahan orde baru sampai awal Reformasi, kesadaran kolektif sebagai bangsa Indonesia yang berdaulat sebagaimana ditanamkan secara gemilang oleh para *founding fathers*, seakan sirna. Di beberapa wilayah, konflik antar suku, ras, agama, kelompok, dan antar golongan terus berkobar dan tidak sedikit disertai jatuhnya korban jiwa.<sup>5</sup> Lunturnya rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia diakibatkan oleh beberapa sebab, di antaranya konflik antar partai politik.

Memasuki era reformasi setelah berakhirnya kekuasaan Orde Baru pada Mei 1998 ditandai dengan *euforia* politik yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat Indonesia.<sup>6</sup> Di tingkat pusat para elit politik yang ketika Orde Baru berkuasa merasa tersingkirkan, mulai merencanakan pembentukan partai-partai baru sebagai bentuk sikap kebebasan politik.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Briyan S. Turner tentang Agama dan Politik, yang menyatakan “*Secara umum, hubungan agama dengan politik selalu diwarnai oleh sejarah hubungan tradisi religius mayoritas dengan tradisi religius minoritas*”.<sup>8</sup> Oleh sebab itu, kita mendeskripsikan adanya benang merah sosial yang menghubungkan kerangka religius monopolistik dengan keadaan plural di manatidak ada masjid sebagai simbol agama Islam resmi dan baku atau mungkin dengan agama lain hampir sama terhadap masyarakat atau pemeluknya.

### A. Sejarah Berdirinya DPC PKB Kabupaten Nganjuk

Secara historis, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan salah satu partai politik yang lahir di Indonesia. Sejarah berdirinya Partai kebangkitan bangsa (PKB) tidak terlepas dari organisasi masa terbesar Nahdhotul Ulama dan para Ulama yang ada di dalamnya dan menjadi panutan massa yang sangat besar. Khususnya peran K.H Abdurahman Wahid selaku ketua PBNU dan umumnya tokoh-tokoh NU sangat penting dalam kelahiran dan penampilan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam pemilu 1999. Didirikan oleh tokoh-tokoh utama Nahdatul Ulama (NU) seperti K. H Abdurahman Wahid (Gus dur), Kyai Musafa Bisri, Kyai Muchit Muzadi, Kyai Ilyas Ruschiyad, dan lainnya, PKB dideklarasikan di kediaman ketua umum PBNU K.H

---

<sup>5</sup> Turmudi, E. (2000). Reformasi dan Konflik Politik antar Pendukung Partai Islam: Studi Kasus di Jepara. *Masyarakat Indonesia*, 26(1), 137–159.

<sup>6</sup> Marijan, K. (2019). *Sistem politik Indonesia: konsolidasi demokrasi pasca Orde Baru*. Kencana. Miall, H. (2000). *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah*,

<sup>7</sup> Humaedi, M. A. (2015). Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangannya dari 1930 sampai Sekarang Karya MC Ricklefs. *Harmoni*, 14(1), 184–197.

<sup>8</sup> West, Ricard & Lynn H. Turner. 2012. Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi. Terjemahan dari *Introducing Communication Theory: Analysis and Application*. Jakarta: Salemba Humanika 2012:395

Abdurahman Wahid, Ciganjur, Jakarta Selatan, pada 23 Juli 1998. Sepertidikatakan ketua umum PBNU Abdurahman Wahid pada pendeklarasian partai kebangkitan bangsa, PKB didirikan untuk menjawab dua permasalahan pertama: “NU tidak berpolitik praktis seperti digariskan pada muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo, Jawa Timur. kedua memberi wadah bagi aspirasi politik setiap warga NU yang di perkirakan sekitar 40 juta jiwa”. Pada periode pertama PKB ini didirikan. Ketua umumnya sendiri adalah Matori Abdul Jalil yang dikenal sebagai tokoh PPP, bukan tokoh NU”.<sup>9</sup>

Sebagai kekuatan politik potensi besar NU terlihat jelas pada pemilu 10 partai tahun 1971 dimana NU memiliki posisi ke-2 setelah Golkar. Namun pada pemilu tahun 1999 dimana NU sudah tidak menjadi partai politik lagi, namun dengan melihat gejala politik saat itu maka NU sebagai organisasi masa islam terbesar di Indonesia berinisiatif untuk mendirikan sebuah partai politik yang di beri nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) namun pada perjalanannya tidak semua warga NU ikut PKB. Pada pertemuan pematangan di Bandung (Pertemuan Bandung), terdapat 39 usulan nama partai atas nama NU, walaupun akhirnya hanya menjadi tiga saja: Nahdatul Ummah, Kebangkitan Ummah, dan Kebangkitan Bangsa. Dengan kata lain, tak lepas dari induknya, basis dukungan PKB adalah warga NU, termasuk didalamnya Ansor, PMII, Fatayat, AMNU, GMNU, dan apa yang dinamakan Gus Dur fans klub yang tidak terbatas pada warga NU semata. Pangkal perjuangan PKB adalah humanisme religius dengan prioritas perjuangan saat itu adalah pengembalian kedaulatan rakyat, keadilan, dan persatuan. Dengan kata lain, konsisten dengan negara kesatuan, tetapi dengan pembagian kue yang adil. Demikian pula dengan tatanan kekuasaan negara, bagi PKB harus ada pemisahan tegas antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Di bidang ekonomi, PKB memperjuangkan transformasi ekonomi pertumbuhan menjadi ekonomi kerakyatan yang pengembangan bisnisnya sesuai dengan potensi Negara (pertanian). Demikian sekilas gambaran perjalanan partai PKB bahwa tidak di pungkiri partai ini mendapatkan dukungan dari salah satu organisasi terbesar di Indonesia yaitu NU.

Dalam sejarah perjalanan PKB yang demikian penulis bermaksud

---

<sup>9</sup> Ibnu Hamad, Hamad (2004) *Konstruksi realitas politik dalam media massa: sebuah studi critical discourse analysis terhadap berita-berita politik*. Yayasan Obor Indonesia, hal.100-101 .

mendeskripsikan untuk membuktikan bahwa PKB merupakan sebuah partai politik yang menjadi salah satu kekuatan politik di Indonesia, jika memang demikian seberapa kuatkah PKB dalam upaya menjadi di Indonesia. Hal ini bisa di lihat dan di buktikan secara lebih detail melalui data kuantitatif membuktikan secara fakta objektif tentang keikutsertaan PKB dalam konstelasi pemilihan di Indonesia, seberapa banyak suara yang di dapatkan hingga bisa disebut sebagai salah satu partai politik yang memiliki kekuatan memi dan menjadi kekuatan politik di Indonesia.

## B. Peran Dan Fungsi Agama Dalam Politik Global

Fenomena yang muncul di Kabupaten Nganjuk saat menjelang reformasi, tepatnya tahun 1998 adalah semangat perubahan menuju kondisi negra yang lebih baik, setelah berakhirnya era orde baru. Asa yang begitu besar dari masyarakat tersebut, memunculkan semangat mendirikan partai, dengan dibentuknya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Nganjuk. Sebagai tindak lanjut. Partai tersebut menjadi harapan besar masyarakat, sebagai kendaraan perubahan dan perbaikan di wilayah Nganjuk. Fenomena sosial berupa gerakan kolektif masyarakat sebagai respon dari situasi sosial yang ada. Menurut Smelser, determinan- determinan yang dapat menimbulkan tingkah laku kolektif (*collective behavior*), yang memunculkan suatu gerakan adalah:

Pertama, *Structural conduciveness*, yaitu situasi yang mendorong atau mempercepat timbulnya gerakan atau suatu keadaan dimana ikatan-ikatan struktur sosial tidak begitu kuat lagi, sehingga banyak orang yang dapat memperoleh apa yang dikehendaknya kapan saja dia mau. Tidak adanya kepastian hukum, tidak ditaatinya peraturan-peraturan yang berlaku, merupakan ciri-ciri determinan ini. Kondisi struktural yang dimaksud adalah situasi negara Indonesia pada tahun 1998 mengalami krisis dalam berbagai bidang. Namun krisis menyebabkan terjadi gejolak di masyarakat adalah krisis kepercayaan. Masyarakat tidak percaya lagi dengan pemerintah dan elite politik dalam upaya mengatasi krisis. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah terjadi hampir di seluruh kota, tidak terkecuali di Kabupaten Nganjuk. Munculnya gerakan pro dan kontra terhadap pelarangan ceramah kyai merupakan akibat dari ketidakmampuan kontrol sosial pemerintah dan elit politik dalam mengakomodasi tuntutan warganya. Masyarakat tidak percaya dengan aparat pemerintah Kabupaten Nganjuk hal ini terjadi

akibat dari kebijakan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk yang sering bertindak diskriminatif terhadap warganya.<sup>10</sup>

Kedua, *Structuralstrain*, yaitu ketegangan struktural yang muncul dan mendorong munculnya suatu gerakan. Ketegangan struktural merupakan hasil kristalisasi dari kondisi struktural. Ketegangan struktural yang dimaksud adalah adanya kekawatiran sebagian warga NU yang berafiliasi dengan PKB terhadap kemunculan partai baru dari kalangan NU sehingga dikhawatirkan dapat merebut basis massa PKB Kabupaten Nganjuk yang sebagian besar berasal dari warga NU. Kemudian para elite PKB melakukan berbagai cara untuk menarik simpati massa dengan menghadirkan Kyai yang menurut sebagian masyarakat Kabupaten Nganjuk sering melontarkan kata-kata kurang pantas sehingga memunculkan pro dan kontra dalam masyarakat Jepara yang diekspresikan dengan demonstrasi, sehingga muncul gesekan antar pendukung yang kemudian adanya ulah provokatif, sehingga memicu kerusuhan.

Ketiga, *Growthand spread of general belief* (penyebaran keyakinan umum), yaitu sebelum suatu perilaku kolektif muncul, para pelaku perilaku kolektif harus mempunyai pandangan dan keyakinan umum yang sama mengenai sumber ancaman, jalan keluar, dan cara pencapaian jalan keluar tersebut. Dalam kasus kerusuhan pada 7 Juli 1998 di Kabupaten Nganjuk keyakinan umum yang tersebar di masyarakat yang mendukung PKB bahwa segalaaktivitas mereka merupakan ibadah yang harus dilaksanakan termasuk dalam hal berpolitik. Perkataan Kyai dijadikan semacam fatwa yang menurut keyakinan mereka berasal dari ajaran *Quran* dan *Hadits*. Masyarakat Islam Kabupaten Nganjuk belum bisa membedakan antara wilayah politik dan wilayah agama sehingga ketika ada kelompok masyarakat yang menolak kehadiran kyai yang dianggap provokatif di Jepara yang menurut mereka “kurang pantas” dalam menyampaikan ceramah di tengah masyarakat, maka oleh para pendukung PKB dan para kyai tersebut melakukan protes balasan karena dianggap menghalangi dakwah Islam.

Keempat, *Precipitating factors* atau faktor pencetus yaitu suatu peristiwa dramatis atau desas-desus yang mempercepat munculnya perilaku kolektif atau gejala sosial.

Kelima, *Mobilization of participant for action*, adalah mobilisasi pengikut yang mengadakan aksi, termasuk didalamnya adalah adanya pemimpin yang menggerakkan massa itu sendiri. Demonstrasi yang dilakukan pada 7 Juli 1998 yang dilakukan oleh pemimpin gerakan, kekuatan aparat keamanan, kebijakan pemerintah hingga kontrol sosial lainnya. Kontrol sosial yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk dan pemimpin gerakan serta kelompok

---

<sup>10</sup> Smelser, N. J. (2011). *Theory of collective behavior*. Quid Pro Books.Sukamto. (1999). *Kepemimpinan Kyai dalam pesantren*. Lp3es.

yang bertikai hanya berlangsung pada tingkat elite dan tidak berpengaruh terhadap massa yang merupakan sumber konflik tersebut, sehingga ditingkat bawah konflik terus berlangsung. Misalnya, muncul sikap saling curiga dimasyarakat karena perbedaan pandangan politik.

Keenam, *Lack of social control*, atau mekanisme berlakunya kontrol sosial yang dilakukan oleh pemimpin gerakan, kekuatan aparat keamanan, kebijakan pemerintah hingga kontrol sosial lainnya. Komunitas pesantren memiliki fungsi dan peran selama ini, sebagai institusi transformasi sosial. Yang merupakan tuntutan masyarakat secara luas dalam era global saat ini. Karena pesantren memiliki multi fungsi, diantaranya sebagai cagar moral bangsa dan di sisi lain sebagai *agent of change* kemajuan serta perkembangan peradaban dan sains sesuai dengan kondisi sosial.<sup>11</sup> Kontrol sosial yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk dan pemimpingerakan serta kelompok yang bertikai hanya berlangsung pada tingkat elite dan tidak berpengaruh terhadap massa yang merupakan sumber konflik tersebut, sehingga di tingkat bawah konflik terus berlangsung. Misalnya, muncul sikap saling curiga di masyarakat karena perbedaan pandangan politik.

### C. Implementasi Nilai Agama Islam Sebagai Dasar Utama Dalam Perpolitikan Global Bagi PKB Di Kabupaten Nganjuk

#### 1. Menggali Akar Kontestasi

Dinamika 7 Juli 1998 di Nganjuk disebabkan oleh beberapa faktor yang melatar belakangi timbulnya kerusuhan. Menurut Smelser, suatu gejolak sosial timbul akibat adanya suatu kondisi struktural yang mendukung atau *structural conduciveness* sehingga memberi kesempatan terbentuknya perilaku kolektif (massa) yang memicu ketegangan dalam masyarakat.<sup>12</sup> Dalam kasus di Nganjuk keberadaan seorang pemimpin sangat berperan untuk memobilisasi massa/kelompok masyarakat untuk bertindak sesuai keyakinan yang dibawa oleh pemimpin tersebut dan sangat berpengaruh dalam diri pengikutnya. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kerusuhan di Jepara pada 7 Juli 1998 dapat dijelaskan dibawah ini.

#### 2. Politisasi Agama

Kerusuhan 7 Juli 1998 di Nganjuk merupakan bentuk konflik warga *nahdliyin* yang bersifat politis. Agama dimanfaatkan oleh partai politik sebagai sarana merekrut dukungan

---

<sup>11</sup> Arif, Mohammad, *Urgensitas Pesantren Dalam Inovasi Pendidikan*, Kediri :IAIN KEDIRI PRESS, 2019., 3.

<sup>12</sup> Smelser, N. J. (2011). *Theory of collective behavior*. Quid Pro Books.Sukamto. (1999). *Kepemimpinan Kyai dalam pesantren*. Lp3es, Hal 28.

massa Islam. Aktivitas keagamaan seperti pengajian dijadikan sebagai media propaganda dan kampanye partai. Keberadaan tokoh kyai dalam partai politik semakin memperkuat politisasi agama untuk kepentingan partai politik. Hal ini bisa dilihat dari bahasa agama yang dipakai untuk melegitimasi partai. Misalnya, pernyataan “kalau tidak memilih partai A atau B tidak masuk surga”. Politisasi agama menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi massa untuk melakukan demonstrasi yang berujung pada kerusuhan.

Masyarakat Nganjuk sendiri secara realitas kehidupannya sangat terikat dengan agama. Agama dipahami sebagai satu-satunya tolak ukur dalam perilaku sehari-hari. Dalam kondisi seperti itu, agama dijadikan alat oleh elite politik untuk memobilisasi massa. Sentimen-sentimen yang berasal dari agama dijadikan pengikat untuk berbuat seakan-akan “membela Tuhan” atau “ajaran Tuhan”, sehingga kekerasan atau kerusuhan seakan-akan dibenarkan dalam agama. Massa juga menggunakan simbol-simbol agama sebagai alat justifikasi perilaku kekerasan.<sup>13</sup> Politisasi agama di masyarakat Nganjuk dilakukan secara sistematis oleh beberapa mubaligh atau kyai dalam pengajiannya. Para kyai yang bersimpati terhadap partai politik tertentu memberi materi ceramah yang berisi ujaran kebencian dan provokasi terhadap massa untuk bertindak radikal terhadap kelompok lain di luar golongannya.<sup>14</sup>

### 3. Keterlibatan Kyai dalam Politik

Keberadaan kyai dan politik adalah entitas yang tak terpisahkan dalam konstelasi politik Indonesia. Kyai telah diakui oleh orang Indonesia atas kontribusinya di bidang keagamaan dan politik.<sup>15</sup> Posisi kyai di Jepara dipandang istimewa dan dianggap sebagai pewaris Nabi. Para santri menerima kepemimpinan kyai karena mempercayai konsep *barokah*.<sup>16</sup> Persepsi tersebut berkembang dimasyarakat dan kemudian menjadi tali pengikat antara kyai, santri dan masyarakat. Pengaruh tersebut kemudian membawa sikap tersendiri di kalangan masyarakat, seperti penghormatan dan kepatuhan akan perintah dan anjuran dari seorang kyai. Dengan kata lain setiap anjuran perlu diikuti.

Merujuk pendapat Endang Turmudi, kyai dibedakan menjadi empat tipologi. *Pertama*, Kyai pesantren, yakni mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengajaran di pesantren.

---

<sup>13</sup> Zazeri, A. (2007). *Kerusuhan Sosial di Desa Dongos Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Tahun 1999 (Suatu Kajian Sejarah Sosial)*. Universitas Negeri Semarang, 32.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Sekretaris DPC PKB Nganjuk, 2 September 2021

<sup>15</sup> Syamsuddin, M. (2013). Kyai dan politik: keterlibatan Kyai madura dalam politik praktis. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 7, 47–72.

<sup>16</sup> Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*, LP3E5, 2004, 26 .

*Kedua*, Kyai tarekat, yakni mereka yang memusatkan perhatiannya dalam membangun kecerdasan batin umat Islam. *Ketiga*, Kyai politik, yaitu mereka yang mempunyai perhatian untuk mengembangkan NU dan terlibat politik praktis. *Keempat*, Kyai panggung, yaitu mereka yang menjadi juru dakwah (*Muballigh*) yang hampir setiap hari menyampaikan ceramah agama di berbagai tempat.<sup>17</sup> Tipe kepemimpinan kyai di Nganjuk menempatkan kyai atau ulama sebagai *patron* dan kalangan santri, dan masyarakat sebagai *klien*-nya. Pola hubungan kyai dalam masyarakat Jepara ditentukan oleh kekuatan kharisma seorang kyai. Seorang kyai bertindak sebagai *patron* untuk memecahkan berbagai persoalan kehidupan yang berkaitan dengan agama, sosial, ekonomi dan politik.<sup>18</sup>

#### 4. Hubungan Antara Agama dan Negara

Masalah hubungan agama dengan negara telah muncul kepermukaan dalam serangkaian polemik dan perdebatan pada dasawarsa-dasawarsa pertama abad ini. Perdebatan ini tampaknya diawali dengan terjadinya revolusi kaum muda Turki di bawah pimpinan Mustafa Kemal Pasya tahun 20- an. Yang berpuncak dengan dihapuskannya *khilafat* di Turki, dilepaskannya Islam sebagai agama resmi negara, dan dihapuskannya syariah sebagai sumber hukum tertinggi dalam negara. Turki lahir sebagai sebuah republik sekuler yang dengan tegas memisahkan urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan.<sup>19</sup>

Tahun yang hampir bersamaan dengan revolusi di Turki itu, seorang hakim Mahkamah Syariah di Mesir, Syeikh Ali Abd al-Raziq menulis buku dengan judul, *al- Islam wa Usul al-hukmi*<sup>20</sup> (Islam dan Asas-asas Pemerintahan) yang tidak saja menimbulkan kegaduhan di kalangan ulama-ulama al-Azhar, tetapi gaung perdebatannya terdengar pula di Indonesia.<sup>21</sup> Kesimpulan akhir dari kajian Abd. Al-Raziq dalam bukunya itu, tertera dalam bab terakhir dengan menjelaskan sebagai berikut: Kenyataan yang sebenarnya adalah bahwa agama Islam tidak mengenal lembaga kekhilafaan (kenegaraan) seperti yang selama ini dikenal oleh kaum muslimin. Lembaga kekhilafaan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan

---

<sup>17</sup> Moesa, A. M. (2007). *Nasionalisme Kyai; Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. LKIS PelangiAksara.

<sup>18</sup> Sahidin. (2001). *Konflik Antar Pendukung Partai Politik: Studi Kasus Kekerasan Massa diDongos Jepara*. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

<sup>19</sup> Berkes, Niyazi. 1964. *The Development of Secularism in Turkey*, Montreal:McGillUniversity Press, 23.

<sup>20</sup>Muhammad, Afif. 1985. *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam* Bandung: Pustaka, 54.

<sup>21</sup>Sewang, M Ahmad dan Samsudduha. 2011. *Hubungan Agama dan Negara, Studi Pemikiran Politik Buya Hamka*, Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 62.

ajaran agama. Demikian pula halnya dengan masalah pemerintahan dan fungsi-fungsi kenegaraan. Semua itu adalah masalah-masalah yang berkenaan dengan politik, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama. Agama tidak mengenal lembaga serupa itu, tetapi juga tidak menolak eksistensinya, tidak memerintahkan, dan tidak pula melarang. Semuanya terserah kepada kita untuk kita pertimbangkan dengan akal kita, dengan pengalaman-pengalaman dan kaidah-kaidah politik yang ada di sekitar kita.<sup>22</sup>

Paham Ali Abd al-Raziq di Indonesia kelihatannya mendapat sambutan baik di kalangan kelompok nasionalis sekuler terutama dalam tulisan-tulisan Ir. Soekarno. Namun, paham ini mendapat tantangan keras dari kalangan modernis muslim terutama oleh Mohammad Natsir, karena *raziqisme*, menurut Natsir, tidak lain adalah *sekularisme* dalam kehidupan kenegaraan yang tidak sejalan dengan asas-asas Islam.<sup>23</sup> Hamka sendiri menurut penuturannya telah menelaah sis buku Raziq pada tahun 1926, di bawah bimbingan ayahnya Dr. Abdul Karim Amrullah yang memperoleh buku itu dalam perjalanannya ke Timur Tengah.<sup>24</sup> Namun begitu, barulah tahun 1970-an Hamka memberikan komentar tentang buku Raziq, setelah buku itu disalin oleh M. Tgk Ide dan dimuat bersambung oleh harian Waspada di Medan.

Islam sebagai agama merupakan satu mata rantai ajaran Tuhan (wahyu Allah) yang menyatu dan kehadirannya di muka bumi telah dinyatakan final dan sempurna hingga akhir zaman. Ajaran Islam merupakan satu kesatuan yang terdiri atas keimanan dan amal yang dibangun di atas prinsip ibadah hanya kepada Allah, bahkan ajaran tentang tauhid (prinsip ke-Esa-an Tuhan) merupakan sistem kehidupan (*manhaj al-hayat*) bagi setiap muslim kapan dan di mana pun. Pendek kata, Islam itu satu kesatuan yang menyeluruh dan tidak dapat dipecah-pecah, *al-Islām kullu lā yatajazā*.<sup>25</sup>

Konsepsi tentang negara dan pemerintahan telah menimbulkan diskusi panjang dikalangan para pemikir muslim dan memunculkan perbedaan pendapat

---

<sup>22</sup> Mahendra, Ihzah Yusril. *Pemikiran Politik Buya Hamka*. (Makalah yang dipresentasikan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Youth Islamic Study Club al-Azhar di Jakarta pada tanggal 13-14 Nopember 1989), 16.

<sup>23</sup> Anwar Harjono, *Pemikiran dan perjuangan Mohammad Natsir*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm.17.

<sup>24</sup> H. Rusydi. *Studi Islam*.1985, Jakarta: Pustaka Panjimas, hlm 19.

<sup>25</sup> Basyir, Azhar Ahmad. 1993. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman; Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*; Bandung: Mizan, hlm; 279.

serta pandangan yang cukup panjang, yang tidak hanya berhenti pada tataran teoritis konseptual, tetapi juga memasuki wilayah politik praktis, sehingga acapkali membawa pertentangan dan perpecahan dikalangan umat Islam.<sup>26</sup> Perbedaan pandangan selain disebabkan sosio-historis dan sosio kultural, juga disebabkan oleh faktor yang bersifat teologis yakni tidak adanya keterangan tegas (*clear cut explanation*) tentang negara dan pemerintahan dalam sumber-sumber Islam (Alquran dan Sunnah). Memang terdapat beberapa istilah yang sering dihubungkan dengan konsep negara, seperti *khalīfah*, *dawlah* dan *hukūmah*, namun istilah tersebut berada dalam kategori ayat-ayat *zanniyah* yang memungkinkan penafsiran. Al-quran tidak membawa keterangan yang jelas tentang bentuk negara, konsepsi tentang kekuasaan, kedaulatan, dan ide tentang konstitusi.

Perbedaan tentang negara dan pemerintahan, dapat dilacak sejak Nabi Muhammad saw wafat. Dalam hal ini terdapat perbedaan pandangan tentang masalah suksesi kepemimpinan yang terjadi di sekitar kewafatan Nabi Muhammad saw. walaupun sebagai kelompok umat Islam (kelompok syiah) meyakini bahwa Nabi Muhammad saw telah mewariskannya kepada Ali bin Abi Thalib melalui peristiwa *Gahdir Khum*. Karya Hamka yang pertama tentang Politik dan Revolusi Agama, menjelaskan “dengan menyebut nama Islam saja, kita teringat pada suatu agama, yang mengatur hidup dunia dan akhirat, diri dan masyarakat bersama. Pendeknya suatu agama-negara, suatu negara-agama.”<sup>27</sup>

Dalam pemikiran politik Islam, pembicaraan tentang negara dan pemerintahan oleh para ulama politik mengarah kepada dua tujuan. *Pertama* menemukan idealitas Islam tentang negara atau pemerintahan (menekankan aspek teoritis dan formal), yaitu mencoba menjawab pertanyaan “apa bentuk negara menurut Islam?”. *Kedua*, melakukan idealisasi dari perspektif Islam terhadap proses penyelenggaraan negara atau pemerintahan (menekankan aspek praksis dan substansial), yaitu mencoba menjawab pertanyaan bagaimana isi negara menurut Islam.<sup>28</sup>

Jika pendekatan pertama bertolak dari anggapan bahwa Islam memiliki konsep tertentu tentang negara dan pemerintahan, maka pendekatan kedua bertolak

---

<sup>26</sup> Hamid, Rosmaniah. 2011. *Makalah Pemikiran Islam tentang Hubungan Agama dan Negara*, 4.

<sup>27</sup> Hamka. 1984. *Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 89-90..

<sup>28</sup> Hamid, Rosmaniah. 2011. *Makalah Pemikiran Islam tentang Hubungan Agama dan Negara*, 6.

dari anggapan bahwa Islam tidak membawa konsep tertentu tentang negara dan pemerintahan, tetapi hanya membawa prinsip-prinsip dasar berupa nilai etika dan moral. Islam, menurut Hamka, bukanlah sekadar agama, tetapi juga sebuah ideologi dan sebuah *weltanschauung* yang meliputi langit bumi, benda nyawa, dan dunia akhirat. Bila saja ajaran-ajaran Islam itu dipelajari dengan sungguh-sungguh dan disertai kecintaan, bukan dengan kebencian, nyatalah bahwa ajaran Islam tidak mengenal sama sekali apa yang disebut perpisahan agama dan negara.

Istilah perpisahan agama dengan negara yang dipergunakan Hamka, tampaknya adalah terjemahan dari kata-kata *separation of church and state* dalam bahasa Inggris *sheiding van kerk en staat* dalam bahasa Belanda. Yang seringkali menjadi bahan pertikaian antara golongan modernis muslim di Indonesia dengan golongan kebangsaan yang sekuler. Gagasan pemisahan ini sebenarnya berhubungan erat dengan teori “dua pedang” atau “dua kekuasaan” dari Paus Gladius pada abad kelima Masehi, yang menegaskan adanya pemisahan yang tajam antara kekuasaan gereja Katolik yang menangani urusan rohaniyah, dengan kekuasaan kaisar (negara) yang menangani urusan duniawiah. Adanya teori pemisahan ini bukan saja dikarenakan adanya kekuasaan gereja Katolik bersifat hierarkis, tetapi juga mendapatkan argumentasi berdasarkan ayat-ayat kitab Injil. Bila disimak baik-baik istilah yang dipergunakan oleh bahasa Inggris dan Belanda di atas, jelaslah bahwa yang dipisahkan dengan negara adalah *church* atau *kerk* (gereja), dan sama sekali bukanlah *religion* atau *goddienst* agama). Pemikir-pemikir politik Kristen sendiri berpendapat tidaklah mungkin akan memisahkan etika dan nilai-nilai Kristen dari kehidupan bernegara.<sup>29</sup>

Islam sendiri, tentulah tidak mengenal adanya hierarki kekuasaan rohaniyah seperti lembaga gereja yang dimiliki agama Katolik. Hamka sendiri, maupun Mohammad Natsir yang pernah berpolemik dengan Ir. Soekarno tentang masalah ini, bukannya tidak menyadari bahwa Islam tidaklah mempunyai institusi kegerejaan, tetapi kekeliruan ini nampaknya timbul dikalangan golongan kebangsaan yang sekuler, yang dikarenakan pendidikan Barat yang mereka peroleh,

---

<sup>29</sup> Sewang, M Ahmad dan Samsudduha. 2011. *Hubungan Agama dan Negara, Studi Pemikiran Politik Buya Hamka*, Cet. I; Makassar: Alauddin Press, hlm. 64.

mengira bahwa teori pemisahan *kerk* dan *staat* seperti dalam agama Kristendi Eropa, haruslah diartikan bahwa agama haruslah dipisahkandari negara Indonesia yang mereka cita-citakan pada zaman pergerakan itu. Jadi, apa yang ditulis oleh Hamka atau Natsir, tidaklah sia-sia walau seolah-olah membicarakan masalah yang tidak relevan dengan Islam.<sup>30</sup> Tetapi paling tidak mereka ingin mendudukan masalah ini pada proporsi yang sebenarnya untuk menghilangkan kesalahpahaman golongan nasionalis sekuler di Indonesia.

Sekalipun agama dengan negara haruslah disatukan, namun Hamka berulang kali menegaskan bahwa penyatuan itu tidaklah membawa implikasi berdirinya sebuah negara teokratis, sebuah istilah yang lagi-lagi dipergunakan oleh golongan nasionalis sekuler dalam menentang ide negara Islam di Indonesia. Hamka menjelaskan, “Agama Islam adalah kepunyaan tiap-tiap orang yang beriman. Dalam Islam tidak ada jabatan kepala agama. Tidak ada Bapak Domine yang harus menjadi perantaraan di antara manusia dengan Allah. Golongan yang disebut ulama, tidaklah diberi hak untuk menguasai agama. Dan tidak ada satu kasta yang semata-mata hanya mengurus agama, sehingga orang banyak harus menunggu keputusan beliau. Kalau suatu agama dikuasai oleh seseorang, padahal dia tidak mendapat *beslit* (surat keputusan) dari Tuhan buat mengatur itu, maka orang lain berhak merampas agama itu dari tangannya dan mendemokrasikannya kembali. Suatu paham dari seorang ulama Islam, boleh ditolak oleh ulama yang lain. Arti sejati dari perkataan ulama ialah orang yang berilmu. Hanya tradisi buatan manusialah.

Dalam kaitannya dengan masalah negara dan pemerintahan, serta prinsip-prinsip yang mendasarinya, maka paling tidak terdapat tiga paradigma tentang pandangan Islam tentang negara, yaitu:

a. Paradigma Integratif

Paradigma integratif, yaitu adanya integrasi antara Islam dan negara, menurut paradigma ini, konsep hubungan agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu (*integrated*). Ini memberikan pengertian bahwa negara

---

<sup>30</sup> Noer, Deliar. 1965. *Pengantar ke Pemikiran Politik* (Medan: Dwipa), hlm. 114.

merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan negara didasarkan atas kedaulatan Ilahi, atau dengan kata lain, paradigma ini meniscayakan adanya negara bagi umat Islam dalam corak negara teokratis, biasanya dengan menegaskan Islam (syariah) sebagai konstitusi negara dan modus suksesi kepemimpinan cenderung bersifat terbatas dan tertutup.

Paradigma seperti ini dianut oleh kelompok syi'ah, yang dalam hal ini bahwa paradigma pemikiran syi'ah memandang bahwa negara (istilah yang relevan dengannya adalah *Imamah* atau kepemimpinan) adalah lembaga keagamaan dan mempunyai fungsi keagamaan. Menurut pandangan syi'ah berhubung legitimasi keagamaan berasal dari Tuhandan diturunkan lewat garis keturunan Nabi Muhammad saw, legitimasi politik harus berdasarkan keagamaan dan hal itu hanya dimiliki oleh keturunan Nabi saw. Berbeda dengan paradigma pemikiran politik sunni yang menekankan *ijma'* dan baiat kepada kepala negara (*khalifah*), paradigma syi'ah menekankan wilayah (kecintaan dan pengabdian Tuhan) dan *'ismah* (kesucian dan dosa) yang hanya dimiliki oleh keturunan Nabi sebagai yang berhak dan berabsah untuk menjadi kepala negara (*imam*).<sup>31</sup>

Sebagai lembaga politik yang didasarkan atas legitimasi keagamaan dan mempunyai fungsi menyelenggarakan "kedaulatan Tuhan", negara dalam perspektif Syi'ah bersifat teokrasi. Negara teokrasi mengandung unsur pengertian bahwa kekuasaan mutlak berada di tangan Tuhan dan konstitusi negara berdasarkan pada wahyu Tuhan (syariah). Sifat teokrasi dapat ditemukan dalam pemikiran banyak ulama politik Syi'ah, Khomaeni umpamanya mengatakan bahwa dalam negara Islam wewenang menetapkan hukum berada pada Tuhan. Tiada seorang pun berhak menetapkan hukum dan yang boleh berlaku hanyalah hukum dari Tuhan.<sup>32</sup>

Kendati demikian, pemikiran politik Iran kontemporer penisbatan Republik Islam Iran dengan negara teokrasi. Sistem kenegaraan Iran memang menyiratkan watak demokratik seperti yang ditunjukkan oleh penerapan asas distribusi kekuasaan berdasarkan prinsip *trias political* dan pemakaian istilah republik dari Negara itu sendiri.

---

<sup>31</sup> Enayat, Hamid. 1992. *Modern Islamic Political Thought* Austin; 2.

<sup>32</sup> Khomeni, Imam. t.th. *Islam and Revolution, Writing and of Imam Khomeni* Barkeley; t.p., 55.

b. Paradigma simbiotik

Menurut paradigma simbiotik, hubungan agama dan negara dipahami saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara memerlukan agama, karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas. Antara agama dan negara merupakan dua identitas yang berbeda. Tetapi saling membutuhkan oleh karenanya, konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal dari adanya *social contract*, tetapi bisa saja diwarnai oleh hukum .

c. Paradigma sekularitas

Menurut paradigma sekularitas, ada pemisahan (*disparitas*) antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua (2) bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan bidangnya masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi (campur tangan).

Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan bidangnya masing-masing. Sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi berdasar pada pemahaman yang dikotomis ini. Maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang betul-betul berasal dari kesepakatan manusia. Berbicara mengenai hubungan agama dan negara di Indonesia merupakan persoalan yang menarik untuk dibahas, penyebabnya bukan karena penduduk Indonesia mayoritas Islam tetapi karena persoalan yang muncul sehingga menjadi perdebatan dikalangan beberapa ahli.

Keterangan perdebatan tentang hubungan agama dan negara ini diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara Islam. Sebagai agama (*din*) dan negara (*dawlah*), agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut, maka hubungan agama dan negara dapat digolongkan menjadi dua:

1) *Hubungan agama dan negara yang bersifat antagonistik.*

Hubungan antagonistik adalah sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antara negara dengan Islam sebagai sebuah agama. Contohnya pada masa kemerdekaan sampai pada masa revolusi politik Islam pernah dianggap sebagai pesaing kekuasaan yang dapat mengusik basis kebangsaan negara. Sehingga persepsi tersebut membawa implikasi keinginan negara untuk berusaha menghalangi dan melakukan domestika terhadap ideologi politik Islam. Hal ini disebabkan pada tahun 1945 dan dekade 1950-an ada dua kubu ideologi yang memperebutkan negara Indonesia, yaitu gerakan Islam dan nasionalis.

Di Indonesia, akar antagonisme hubungan politik antara Islam dan negara tak dapat dilepaskan dari konteks kecenderungan pemahaman keagamaan yang berbeda. Awal hubungan yang antagonistik ini dapat ditelusuri dari masa pergerakan kebangsaan ketika elit politik nasional terlibat dalam perdebatan tentang kedudukan Islam di alam Indonesia merdeka. Upaya untuk menciptakan sebuah sintesis yang memungkinkan antara Islam dan negara terus bergulir hingga periode kemerdekaan dan pasca-revolusi. Kendatipun ada upaya-upaya untuk mencari jalan keluar dari ketegangan ini pada awal 1970-an, kecenderungan legalistik, formalistik dan simbolistik itu masih berkembang pada sebagian aktivis Islam pada dua dasawarsa pertama pemerintahan orde baru. Hubungan agama dan negara pada masa ini dikenal dengan antagonistik, di mana negara betul-betul mencurigai Islam sebagai kekuatan potensial dalam menandingi eksistensi negara. Di sisi lain, umat Islam sendiri pada masa itu memiliki ghirah atau semangat yang tinggi untuk mewujudkan Islam sebagai sumber ideologi dalam menjalankan pemerintahan.

2) *Hubungan akomodatif.*

Hubungan akomodatif adalah sifat hubungan di mana negara dan agama satu sama lain saling mengisi bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik. Pemerintah menyadari bahwa umat Islam merupakan kekuatan politik yang potensial, sehingga negara

mengakomodasi Islam. Jika Islam ditempatkan sebagai *out side* negara maka konflik akan sulit dihindari yang akhirnya akan mempengaruhi NKRI. Sejak pertengahan tahun 1980-an, ada indikasi bahwa hubungan antara Islam dan negara mulai mencair, menjadi lebih akomodatif dan integratif.

Sementara itu, wacana intelektualisme dan aktivisme politik Islam yang substansialistik, sebagaimana dikembangkan oleh generasi baru Islam, merupakan modal dasar untuk membangun sebuah sintesa antara Islam.<sup>33</sup>

##### 5. Hubungan Agama dan Negara Menurut Islam

Dalam Islam, hubungan agama menjadi perdebatan yang cukup hangat dan berlanjut hingga kini di antara para ahli. Bahkan menurut Azzumardi Azra, perdebatan itu telah berlangsung sejak hampir satu abad, dan berlangsung hingga dewasa ini. Ketegangan perdebatan tentang hubungan (agama dan negara diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara Islam sebagai agama (*din*) dan negara (*dawlah*). Dalam bahasa lain, hubungan antara agama dengan politik (*siyasah*) dikalangan umat Islam, terlebih-lebih dikalangan sunni yang banyak diatur oleh masyarakat Indonesia, pada dasarnya bersifat *ambiguous* atau *ambivalen*. Hal demikian itu karena ulama sunni sering mengatakan bahwa pada dasarnya dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Sementara terdapat pula ketegangan pada tataran konseptual maupun tataran praktis dalam politik, sebab seperti itu yang dilihat terdapat ketegangan dan tarik ulur dalam hubungan agama dan politik.

Tentang hubungan antara agama dan negara dalam Islam, menurut Munawir Sjadzali, ada tiga aliran yang menanggapinya. Pertama, aliran yang menganggap bahwa agama Islam adalah agama paripurna yang mencakup segala-galanya, termasuk masalah-masalah negara. Oleh karena itu, agama tidak dapat dipisahkan dari negara, dan urusan negara adalah urusan agama serta sebaliknya.

---

<sup>33</sup> Efendi, Bachtiar. 1998. *Islam dan Negara*; Jakarta: Paramadina. Enayat, Hamid. 1992. *Modern Islamic Political Thought* Austin; t.p.

Aliran kedua, mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara, karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad saw tidak punya misi untuk mendirikan negara. Aliran ketiga berpendapat bahwa Islam tidak mencakup segala-galanya, tapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat termasuk bernegara. Oleh karena itu, dalam bernegara, umat Islam harus mengembangkan dan melaksanakan nilai-nilai dan etika yang diajarkan secara garis besar oleh Islam.

Hussein Muhammad, menjelaskan bahwa dalam Islam ada dua model hubungan antara agama dan negara. Model pertama, ia disebut sebagai hubungan integralistik, dan yang kedua disebut hubungan simbiosis mutualistik. Hubungan integralistik dapat diartikan sebagai hubungan totalitas, di mana agama dan negara mempunyai hubungan yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedua merupakan dua lembaga yang menyatu (integral). Ini juga memberikan pengertian bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Konsep ini menegaskan kembali dalam Islam bahwa tidak mengenal pemisahan agama, politik atau negara. Konsep seperti ini sama dengan konsep teokrasi.

Model hubungan kedua adalah hubungan simbiosis-mutualistik. Model hubungan agama dan negara model ini, menurut Hussein Muhammad, menegaskan bahwa antara agama dan negara terdapat hubungan yang saling membutuhkan. Menurut pandangan ini, agama harus dijalankan dengan baik dan tertib. Hal ini hanya terlaksana bila ada lembaga yang bernama negara. Sementara itu, negara juga tidak dapat dibiarkan berjalan sendiri tanpa agama. Sebab tanpa agama, akan terjadi kekacauan dan amoral dalam bernegara.

## 6. Islam dan Demokrasi

Konsep demokrasi dewasa ini dipahami secara beragam oleh berbagai kelompok kepentingan yang melakukan teoritisasi dan perspektif untuk tujuan tertentu. Keragaman konsep tersebut meskipun terkadang juga sarat dengan aspek-aspek subjektif dari siapa yang merumuskannya, sebenarnya bukan sesuatu yang harus dirisaukan. Karena hal itu sesungguhnya mengisyaratkan esensi demokrasi itu sendiri yaitu adanya perbedaan pendapat.

Pada tataran praktis, rekonsiliasi tuntutan kelompok (mayoritas dan minoritas) ini seringkali tidak tercapai. Akibatnya, kualitas demokrasi itu sendiri menjadi tidak sejati. Abraham Lincoln (negarawan Amerika) mengistilahkan demokrasi sebagai “*government of the people, by the people, for the people*.”<sup>34</sup> Ada dua problem tentang hubungan islam dan demokrasi. Pertama, problem filosofis yakni jikaklaim agama terhadap pemeluknya sedemikian total, maka akan menggeser prinsip-prinsip demokrasi. *Kedua*, problem historis sosiologis, yakni ketika kenyataannya peran agama tidak jarang digunakan oleh penguasa untuk mendukung kepentingan politiknya.<sup>35</sup>

Bagi kalangan Neo-Modernis Islam, demokrasi dan agama sesungguhnya dapat dipertemukan. Demokrasi dipandang sebagai aturan politik yang paling layak, sementara agama diposisikan sebagai wasit moral dalam mengaplikasikan demokrasi. Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa nilai demokrasi ada yang bersifat pokok dan ada yang bersifat derivasi atau lanjutan. Menurutnya, ada tiga hal pokok demokrasi yaitu kebebasan, keadilan, dan musyawarah.<sup>36</sup>

Nurcholis Majid mengatakan bahwa kita memiliki demokrasi sebagai idiologi, tidak hanya karena pertimbangan-pertimbangan prinsipil yaitu karena nilai-nilai demokrasi itu dibenarkan dan didukung semangat ajaran Islam, tetapi juga karena fungsinya sebagai aturan permainan politik yang terbuka. Analisi mengenai seluk beluk demokrasi ini, banyak berlandaskan Alquran, seperti tentang kebebasan dan tanggung jawab individual, sikap kebijaksanaan, tentang keadilan, dan tentang musyawarah.

Demokrasi menganut pandangan dasar kesetaraan manusia, sehingga hak-hak individu dapat dijamin kebebasannya, kata kuncinya adalah adanya kesepakatan dengan tujuan kebaikan bersama. Gagasan-gagasan demokrasi pada intinya bahwa agama baik secara idiologi maupun sosiologis sangat mendukung proses demokratisasi. Agama lahir dan berkembang untuk melindungi dan

---

<sup>34</sup> Ebenstein, William , Great political thinkers : Plato to the present, Alan Ebenstein, 1998;7.

<sup>35</sup>Muh. Tahir Azhary, Negara Hukum ; Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini, Jakarta : Kencana, 2005, h 91-92.

<sup>36</sup>Abdurrahman Wahid. 1993. Islam di Tengah Pergulatan Sosial, Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm. 90.

menjunjung tinggi harkat manusia. Karena itu, meskipun agama tidak secara sistematis mengajarkan praktek demokratis, namun agama memberi *spirit* dan muatan doktrinal yang mendukung bagi terwujudnya kehidupan demokratis.<sup>37</sup>

#### 7. Hubungan Antara Agama dan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah suatu hal yang melekat pada diri manusia sebagai hak dasar yang diberikan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya. Menghargai hak asasi tersebut adalah suatu kewajiban bagi yang lain untuk mendapatkan perlindungan, sehingga memungkinkan terpenuhi hak-hak tersebut. Dalam *Encyclopedia Internasional* dikatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar dan kebebasan fundamental manusia baik laki-laki maupun perempuan yang diakui di dunia, tanpa membedakan rasa dan seks.

Kebutuhan dasar manusia meliputi jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasab*), harta benda (*al-māl*), dan agama (*al-dīn*). Jadi ajaran Islam di sini melindungi kebutuhan dasar manusia dan melarang pelanggaran apapun terhadap kebutuhan dasar manusia tersebut. Agama Islam sebagai salah satu norma meletakkan prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari Tuhan dan prinsip-prinsip tersebut tidak ada yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Hal tersebut terjadi karena Tuhan yang menciptakan manusia dan Dia juga yang memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian, esensi berpendapat dalam Islam bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia, atau dengan kata lain mengembangkan potensi yang ada pada setiap orang. Hal ini berarti manusia berpartisipasi terhadap sesuatu yang dipandang terbaik baginya.

Begitu pentingnya kebebasan berpendapat dalam Islam, sehingga penguasa diwajibkan untuk bermusyawarah, agar setiap orang dapat memberi manfaat atas potensi yang mereka miliki untuk kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan orang lain. Mengenai perlindungan harta, mengimplikasikan hak untuk memiliki. Salah satu hak asasi dalam Syariat Islam adalah hak memiliki, meskipun secara hakiki bahwa segala sesuatu itu milik Tuhan. Namun dalam syariat Islam, Tuhan memberi hak kekuasaan pemilikan kepada manusia untuk memiliki sesuatu sebagai haknya dan dapat saja berbeda antara seorang dengan orang lain sesuai dengan

---

<sup>37</sup> Darmadi, Hamid. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 23.

kemampuan dan rezekinya. Berdasarkan hal ini, maka Shaby abd Said menambahkan bahwa di samping ayat-ayat menerangkan tentang hak-hak kepemilikan, juga diterangkan dalam hadis seperti tidak dihalalkannya harta seorang muslim diambil oleh seorang muslim lainnya, kecuali dengan cara yang baik dari pemilik harta.<sup>38</sup>

Dapatlah dipahami bahwa pemilikan dalam Islam adalah pemilikan yang seimbang antara pemilikan perorangan, kelompok dan masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan agar terjadi keseimbangan kepemilikan dalam suatu negara, sehingga dapat menciptakan keseimbangan sosial ekonomi untuk mencegah kecemburuan sosial dalam suatu masyarakat atau negara. Terakhir adalah perlindungan agama yang mengimplikasikan hak kebebasan beragama. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kepercayaan, sedangkan agama mengandung kepercayaan didalamnya, sehingga agama merupakan tempat perlindungan terbaik bagi yang mempercayainya.

## **PENUTUP**

Dari hasil pembahasan dalam penelitian ini, setelah finalisasi data yang telah dikaji secara mendalam dan maksimal. Dapat peneliti simpulkan, sebagai hasil final dalam penelitian ini. Sedangkan kesimpulannya sebagai berikut :

1. Peran dan fungsi agama dalam politik global saat ini, adalah kolaboratif dan bahkan simbiosis mutualistis.
2. Implementasi nilai agama Islam sebagai dasar utama dalam perpolitikan global bagi PKB di Kabupaten Nganjuk adalah realistis historis. Kelahirannya dibidani oleh NU.
3. Eksistensi nilai-nilai Islam sebagai dasar dan landasan utama dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan PBNU, berpedoman pada aqidah ASWAJA, selalu aspiratif terhadap prinsip Bhineka Tunggal Ika dan NKRI Harga Mati.

---

<sup>38</sup> Said, Abdu Shabhi. *al-Sulthatu wa al-Huriyyah fi al-Nidhām al-Islāmiy*, t.t: Daral- Fikr, hlm;157.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman Wahid. 1993. *Islam di Tengah Pergulatan Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Agama Dan Politik Global dalam <http://suar.okezone.com/read/2007/11/07/58/59069/agama-dan-politik-global>, diakses 10-9- 2021.
- Anwar, Harjono. 2001. *Pemikiran dan perjuangan Mohammad Natsir*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Arif, Mohammad. 2019. *Urgensitas Pesantren Dalam Inovasi Pendidikan*. Kediri: IAIN KEDIRI PRESS.
- Azizy, Qodri. 2004. *Melawan Globalisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Basyir, Azhar Ahmad. 1993. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman; Seputar Filsafat, Hukum, Politikdan Ekonomi*. Bandung: Mizan.
- Berkes, Niyazi. 1964. *The Development of Secularism in Turkey*. Montreal: McGill University Press.
- Darmadi, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Ebenstein, William. *Great political thinkers : Plato to the present*. Alan Ebenstein.
- Efendi, Bachtiar. 1998. *Islam dan Negara*. Jakarta: Paramadina.
- Enayat, Hamid. 1992. *Modern Islamic Political Thought* Austin.
- Hamid, Rosmaniah. 2011. *Makalah Pemikiran Islam tentang Hubungan Agama dan Negara*.
- Hamka. 1984. *Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Humaedi, M. A. 2015. *Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangannya dari 1930 sampai Sekarang*. Karya MC Ricklefs.
- Ibnu Hamad, Hamad. 2004. *Konstruksi realitas politik dalam media massa: sebuah studi critical discourse analysis terhadap berita-berita politik*. Yayasan Obor Indonesia.
- Kaelan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.
- Khomeini, Imam. t.th. *Islam and Revolution, Writing and of Imam Khomeini*. Barkeley.
- Mahendra, Ihzah, Yusril. *Pemikiran Politik Buya Hamka*. (Makalah yang dipresentasikan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Youth Islamic Study Club al-Azhar di Jakarta pada tanggal 13-14 Nopember 1989).
- Marijan, K. 2019. *Sistem politik Indonesia: konsolidasi demokrasi pasca Orde Baru*. Kencana.
- Miall, H. 2000. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*.

- Moesa, A. M. 2007. *Nasionalisme Kyai; Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. LKIS Pelangi Aksara.
- Muhammad, Afif. 1985. *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam* Bandung: Pustaka.
- Muh. Tahir Azhary. 2005. *Negara Hukum ; Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini*, Jakarta : encana.
- Muhtadi, Asep Saeful. 2004. *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*, LP3E5
- Natsir, Mohammad. 1968. *Persatuan Agama dan Negara*. Padang: Japi.
- Noer, Deliar. 1965. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Medan: Dwipa.
- Rusydi. 1985. *Studi Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Sahidin. 2001. *Konflik Antar Pendukung Partai Politik: Studi Kasus Kekerasan Massa di Dongos Jepara*. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Said, Abdu Shabhi. *al-Sulthatu wa al-Huriyyah fi al-Nidhām al-Islāmiy*, t.t: Daral- Fikr.
- Sewang, M Ahmad dan Samsudduha. 2011. *Hubungan Agama dan Negara, Studi Pemikiran Politik Buya Hamka*, Cet. I; Makassar: Alauddin Press.
- Smelser, N. J. (2011). *Theory of collective behavior*. Quid Pro Books. Sukamto. (1999). *Kepemimpinan Kyai dalam pesantren*. LP3ES.
- Syamsuddin, M. (2013). Kyai dan politik: keterlibatan Kyai madura dalam politik praktis. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 7.
- Turmudi, E. (2000). Reformasi dan Konflik Politik antar Pendukung Partai Islam: Studi Kasus di Jepara.
- Wawancara dengan Sekretaris DPC PKB Nganjuk, 2 September 2021
- West, Ricard & Lynn H. Turner. 2012. *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi. Terjemahan dari Introducing Communication Theory: Analysis and Application*. Jakarta: Salemba Humanika 2012.
- Zazeri, A. (2007). *Kerusuhan Sosial di Desa Dongos Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Tahun 1999 (Suatu Kajian Sejarah Sosial)*. Universitas Negeri Semarang.